

HUBUNGAN BILATERAL KERAJAAN MORONENE DENGAN KESULTANAN BUTON TAHUN 1491-1537¹

Oleh:

Sukma Nengsi²

Email: Nengsi.sukma76@gmail.com

³Darnawati

email: darnawati@uho.ac.id

ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan latar belakang hubungan kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537, 2) Mendeskripsikan hubungan bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537, 3) Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan prosedur mengacu pada Helius Sjamsuddin dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengumpulan sumber (heuristik) yaitu kegiatan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus kajian, 2) Kritik sumber (verifikasi) yaitu untuk mengetahui otentitas (keaslian) dan kredibilitas (kebenaran) data yang berhasil dikumpulkan, 3) Penulisan sejarah (historiografi) yaitu menyampaikan sintesa dalam bentuk kisah sejarah. Dalam kajian pustaka penelitian ini menggunakan konsep sejarah, hubungan bilateral, konsep kerajaan, dan konsep kesultanan buton, serta penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang hubungan Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 merupakan daerah Kesultanan Buton yang diperintah langsung secara adat (*de jure*) tetapi tidak langsung dalam pemerintahan. 2) Hubungan bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 yaitu: a) Bidang ekonomi dimana setiap tahun Kerajaan Moronene selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan Buton, b) Bidang politik yaitu: 1) Jabatan sapati harus dijabat oleh pangeran dari Kabaena, 2) Kesultanan Buton sebagai pemimpin pertahanan keamanan bila ada serangan dari luar secara bersama-sama menyiapkan pasukan angkatan perang, 3) Kerajaan Rumbia jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Buton agar menyuplai bahan-bahan bangunan dari atap rumbia, 4) Kerajaan Poleang dijadikan sebagai pusat wisata berburu, dan, 5) Kerajaan Kabaena sebagai suplai beras 3) Faktor-faktor terjadinya hubungan antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton tahun 1491-1537 yaitu: a) Faktor politik dimana adanya perjanjian *bumingkalo*, b) Faktor ekonomi yaitu setiap tahun Kerajaan Moronene panen selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan dan, c) Faktor Keamanan yaitu Kerajaan Moronene telah menyiapkan pasukan-pasukan untuk menghadapi serangan dari luar yaitu ancaman yang datang dari pasukan La Bolontio.

Kata Kunci: Kerajaan, Moronene dan Hubungan

PENDAHULUAN

Memahami nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam keragaman kehidupan masyarakat, senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan pada berbagai aspek kehidupan baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, sejak dari manusia pertama sampai sekarang bahkan yang akan datang. Perubahan dan perkembangan tersebut tetap berlangsung, hal ini terjadi baik secara evolusi maupun secara revolusi tergantung dari besarnya pengaruh budaya dari dalam maupun dari

¹ Hasil penelitian tahun 2019

² Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah

³ Dosen FKIP UHO

luar. Suatu kemustahilan bilamana terdapat sekelompok manusia atau masyarakat yang tidak mempunyai budaya atau karya. Sebaliknya tidak akan ada budaya tanpa kehadiran manusia.

Etnik Moronene sebagai penduduk asli di Kabupaten Bombana merupakan salah satu kelompok masyarakat yang pertama kali mendiami daratan Sulawesi Tenggara, sebelum etnik Tolaki yang ada sekarang ini. Semula mereka bermukim disekitar Danau Matana Sulawesi Tengah, kemudian mereka berpindah kearah Sulawesi Tenggara dan membuat perkampungan di beberapa wilayah daratan. Sebagian dari mereka secara sporadis mendiami wilayah Konawe yang sekarang didiami oleh etnik Tolaki dan sebagian lainnya terus melanjutkan perjalanan kearah barat memasuki wilayah Kolaka yang sekarang didiami oleh etnik Mekongga.

Penuturan tersebut mengidentifikasi bahwa sebelum tinggal menetap di wilayah Bombana komunitas Moronene tinggal dan bermukim di beberapa kampung di wilayah Konawe dan Kolaka. Adapun nama-nama kampung yang pernah menjadi permukiman orang-orang Moronene antara lain; Ranoea, Pohara, Moto'i, Moramo, dan Lapoa di Konawe. Demikian juga, di wilayah Kolaka terdapat bekas perkampungan Moronene seperti Wtulindu, Tikonu, Towua, Watalara, Baula, Pomalaa, Wolulu, Watubangga, Langkosipi, dan masih banyak lagi yang sampai saat masih digunakan sebagai nama kampung bahkan nama desa-desa resmi.

Awal pemerintahan pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia, sekelompok Suku Moronene mendiami wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Di wilayah daratan terdiri Distrik Poleang dan Distrik Rumbia, sementara di wilayah kepulauan meliputi Distrik Kabaena. Sejak pembentukan pemerintahan di wilayah ini sampai terbentuknya daerah otonom (Kabupaten Bombana tahun 2003), yang meliputi 6 kecamatan, wilayah Moronene tersebut adalah menjadi wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Buton.

Selanjutnya wilayah Moronene didatangi oleh penduduk dari suku bangsa di tanah air, seperti: Suku Bugis, Muna, dan Suku Bajo. Keempat suku bangsa ini telah ada sejak masa penjajahan sampai sekarang ini. Selain itu, melalui proses interaksi sosial dan proses kawin-mawin, wilayah ini juga telah didiami oleh suku-suku lain seperti, orang Tolaki dari Konawe dan orang Mekongga dari Kolaka, yang keduanya memiliki corak kebudayaan yang sama dengan Moronene, sehingga kedua suku ini biasa disebut "sodarah serumpung". Selain itu, ada juga Suku Makassar, Toraja, Luwuk, dan lain-lain. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, sebagian wilayah Moronene tersebut telah dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia seperti Jawa, Lombok, Bali dan Sunda, yang di suku Moronene di datangkan oleh pemerintah melalui program transmigrasi.

Eksistensi permukiman suku Moronene yang mendiami wilayah daratan dan pulau Kabaena tersebut di atas memiliki akar sejarah dan kebudayaan sangat panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari ditemukannya peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa artefak, bangunan, kuburan kuno, permukiman kuno.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini maka yang menjadi tempat atau lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Penelitian ini menggunakan sejenis penelitian sejarah deskriptif kualitatif, dimana pada rumusan masalah pertama, kedua dan yang ketiga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena menyajikan data yang berupa kata-kata dan bahasa. Jenis penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif ini juga menggunakan pendekatan yaitu pendekatan strukturalis. Pendekatan strukturalis yaitu mempelajari peristiwa dan struktur sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Artinya, peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat. Pendekatan strukturalis memandang pelaku sejarah yang konkret sebagai faktor yang menentukan dalam sejarah, namun perilaku individu atau pelaku sejarah tidak dapat dipisahkan dari struktur.

Adapun sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1) Sumber tertulis, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tertulis berupa skripsi, buku

dan laporan hasil penelitian dari perpustakaan. 2) Sumber lisan, yaitu data melalui keterangan lisan atau wawancara dengan lima orang tokoh masyarakat yang mengetahui tentang masalah yang berhubungan dalam penelitian ini. 3) Sumber visual, yaitu data diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat lain.

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Sjamsuddin (2007: 85-239) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) Heuristik (pengumpulan sumber), (2) verifikasi (Kritik Sumber), dan (3) Historiografi (penulisan sejarah). Prosedur ini pada dasarnya sama saja dengan prosedur penelitian sejarah lainnya dengan asumsi data-data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Hubungan Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton Tahun 1491-1537.

Suku Moronene adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah pada bagian ujung selatan jazirah Sulawesi Tenggara dan Pulau Kabaena, pada zaman dahulu juga membentuk kerajaan yang menurut cerita dalam epos kepahlawanan suku Moronene mereka berasal dari langit. Moronene sendiri berasal dari kata majemuk *Moro* yang berarti serupa atau semacam, dan *Nene* yang berarti resam atau pohon resam. Jadi, kata Moronene adalah berasal dari nama sejenis tumbuhan yang menyerupai pohon resam (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018).

Dalam perkembangannya suku Moronene sering mendapat serangan dari suku-suku lain. Peperangan dengan suku-suku lain itu telah melemahkan kerajaan Moronene sehingga terpecah menjadi tiga kerajaan kecil masing-masing Rumbia, Poleang, dan Kotuo atau sekarang dikenal dengan sebutan Kabaena.

Menurut versi tradisi lokal yang lain, cikal bakal suku bangsa Moronene berasal dari sekelompok orang yang dipimpin oleh La Pao (raja) yang berlayar dari Mata Oleo, tempat matahari terbit. Mula-mula mereka tiba di Muna dan Buton, tetapi karena sudah ada orang-orang yang menetap di sana mereka pergi ke Kabaena dan Sulawesi Selatan, di wilayah-wilayah yang belum berpenghuni. Kelompok orang yang dikepalai La Pao itulah yang menurunkan kerajaan Poleang. Sementara itu, datang putra raja Luwuk bernama Halu Oleo. Di sini Halu Oleo mengawini saudara perempuan Elu-Ute-Ntoluwu anak raja Poleang. Kehadiran Halu Oleo di sini untuk membantu kerajaan Polea mengusir bajak laut Tobelo (Muh. Fian, wawancara 4 Januari 2019).

Diperkirakan tahun 720 M, Sawerigading tiba di daerah ini dari Luwuk dengan maksud untuk melantik *Dendeangi* atau *Tongki Puu Wonua* sebagai tokoh dan pemimpin baru, yang sedang berkembang dan berkedudukan di *Tangkeno Wawolesea*, sekitar sungai Laa Moronene (yang sekarang berada di daerah Pangkuri) Desa Taubonto, yang merupakan bukti nyata di hulu sungai Laa Moronene terdapat *Tangkeno Wawolesea*. Adapun arti dari kalimat *Tangkeno Wawolesea* adalah alun-alunis tana raja dahulu, setiap acara penobatan raja yang baru, diulas bahwa wilayah kekuasaannya disebut Bombana yakni termaksud *Keu Wia*, *Lembompari*, dan *Wonua Karambau*, sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan, Rumbia, Poleang, dan Kabaena. Keberhasilan Sawerigading melantik raja Moronene yang pertama ini, kemudian sebagai imbalan jasa, Sawerigading diberi gelar *Tari Morompu*, yang berarti bambu yang rimbun dengan perlambangan bahwa bambu yang rimbun menunjukkan Sawerigading diibaratkan orang yang megah dan gagah. Sebagai tambahan diungkapkan oleh Sawerigading bahwa batas wilayah Moronene secara turun temurun adalah daerah tempat tumbuhnya pohon bambu berduri (*Tari Koriu*) dalam bahasa Moronene (Muh. Fian, wawancara 4 Januari 2019).

Hubungan Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton Tahun 1491-1537

Selama berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan di Nusantara menjalin interaksi, komunikasi dan hubungan kerjasama. Menurut Budiono, suatu hubungan dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan kerajaan demi

tercapainya tingkat kemakmuran pada kerajaan tersebut. Hubungan ini dapat berlangsung dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya.

Hubungan dalam bidang politik seringkali memusatkan perhatian pada aspek keamanan, perang, persenjataan, aliansi dan lain sebagainya. Demikian juga dalam bidang ekonomi dengan bertitik tolak pada rasa saling bergantung secara ekonomis yang melahirkan hubungan antar bangsa. Kondisi ketergantungan tersebut menyebabkan situasi politik dan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari bangsa lainnya, karena merupakan suatu arah dasar dari hubungan antar bangsa atau kerajaan.

Kerajaan Moronene dan Kesultanan Buton adalah kerajaan yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dengan segala histori kejuangannya. Kerajaan Moronene merupakan daerah yang diperintah langsung oleh Kesultanan Buton berdasarkan adat Moronene (*de jure*) (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018).

Wilayah kekuasaan Buton meliputi Pulau Buton, Pulau Muna, Kabaena, Kadatua, Siompu, pulau-pulau kecil di Tiworo, Kepulauan Tukang Besi (Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko) dan Rumbia serta Poleang yang terletak didarat tenggara Pulau Sulawesi. Buton juga menyatakan diri berkuasa atas Pulau Wowonii tetapi tidak pernah diakui oleh Belanda. Dikatan bahwa, pada masa itu salah satu pertimbangan terciptanya hubungan kerjasama antara Kerajaan Moronene dengan Kerajaan/Kesultanan Buton dan beberapa kerajaan tetangganya dilihat dari letak geografis wilayah Kerajaan Moronene yang strategis, dimana dapat dijangkau melalui transportasi darat maupun transportasi laut (Jabaluddin, wawancara 19 Januari 2019).

Terjadinya hubungan kerjasama antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton telah menciptakan ikatan persahabatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Hal ini dapat diketahui bahwa Kerajaan Moronene merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat perdagangan barang dan jasa (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018).

Hubungan Bilateral Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton Tahun 1491-1537

Kerjasama bilateral ini meliputi kerjasama antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton. Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa. Kerjasama bilateral juga diartikan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara tertentu. Dengan kata lain, kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dibangun oleh dua negara saja. Kerjasama bilateral tidak hanya dibangun dalam bidang ekonomi saja, tetapi kerjasama ini dibangun juga dalam bidang politik.

1. Bidang Ekonomi

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa, salah satu aspek positif yang dimiliki Kerajaan Moronene dalam mencapai kejayaannya pada masa itu didukung oleh letak dan kondisi geografisnya yang strategis dan tanahnya subur serta potensi kekayaan alamnya yang beragam dan melimpah. Hal inilah yang kemudian adanya hubungan-hubungan Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton (Yanca, wawancara 19 Januari 2019).

Dalam mengoptimalkan potensi alam tersebut, Kerajaan Moronene menjalin Hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara dalam rangka mengembangkan sektor perekonomian mereka. Terjadinya interaksi pasar tersebut dengan sendirinya Kerajaan Moronene mendapatkan keuntungan ekonomi di satu sisi dan keuntungan hubungan politik di sisi lain, karena semua kerajaan-kerajaan tetangga termasuk Kesultanan Buton ingin melakukan hubungan dengan Kerajaan Moronene karena faktor potensi alam tersebut. Sejalan dengan itu, hubungan ekonomi Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton yaitu dimana setiap tahun Kerajaan Moronene selalu membawah upeti berupa beras kepada Sultan (Raja Buton ke-V) di Bau-Bau (Haiboba) bernama Mulae, oleh karena melimpahnya beras di daerah ini (Yanca, wawancara 19 Januari 2019).

2. Bidang Politik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, terjadinya hubungan antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton salah satunya dari unsur politik (Yanca, wawancara 19 Januari 2019). Dimana dalam unsur politik ini terjadi kesepakatan bersama antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton yang menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya: (a) Jabatan Sapati harus dijabat oleh pangeran dari Kabaena mewakili kerajaan-kerajaan Moronene, (b) Wolio dalam hal ini Kesultanan Buton sebagai pemimpin pertahanan keamanan bila ada serangan dari luar secara bersama-sama menyiapkan pasukan angkatan perang. (c) Kerajaan Rumbia jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Buton agar menyuplai bahan-bahan bangunan dari atap rumbia samapai ramuan kayu. (d) Kerajaan Poleang dijadikan sebagai pusat wisata berburu, sebab sifat Kesultanan Buton yang tertutup maka daerah Pajongang di daerah Poleang dijadikan pusat berburu jika ada tamu kesultanan baik dari kerajaan barat Bone dan Goa maupun dari kerajaan utara, Luwu, Mekongga dan Konawe. (e) Kerajaan Kabaena sebagai suplai beras untuk kesultanan berhubung karena Kabaena merupakan daerah yang subur dan makmur dimasa lalu (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018).

Faktor-Faktor Terjadinya Hubungan antara Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton Tahun 1491-1537

Suatu hubungan dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan kerajaan demi tercapainya tingkat kemakmuran pada kerajaan tersebut. Hubungan ini dapat berlangsung dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, dan keamanan.

1. Faktor Politik

Sebagaimana Martin Staniland menyebutkan, bagaimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan bagaimana institusi-institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. Kedua bidang (Ekonomi Politik) dimaksud, secara *explanatory* dan *normative* sesungguhnya saling komplementasi, tergantung pada keperluan mana di tempatkan. Ia berhubungan satu dengan yang lainnya dalam upaya menjelaskan bagaimana hubungan antara bidang ekonomi dan bidang politik berproses serta dapat berkaitan melalui pengaruh yang bersifat timbal balik. Misalnya pada filsafat dasar kausalitas; mana yang sebab dan mana yang akibat. Sisi yang paling dominan akan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang berlaku, bisa saja proses politik lebih dominan dibanding aspek-aspek ekonomi, atau sebaliknya.

Pada masa pemerintahan Raja Mulae di Kesultanan Buton terjadi kesepakatan dengan Opu Manjawari Sugilara *Mokole* Kabaena (*wonua carambau* dan *betoambari mokole polea* (*wonua lombopari*) di Rahadopi tahun 1513. Kesepakatan dengan Raja Luwu dan *Mokole* Poleang serta *Mokole* Rumbia Patoambari (Kenepulu Kerajaan Buton) berdasarkan perjanjian *Bumingkalo*, yang melepas klaim Kadatua terhadap daerah Poleang (*wonua lembopari*) dan Rumbia (*wonua kewia*). Kesepakatan ini melahirkan pengakuan daerah Poleang dan Rumbia menjadi daerah perdagangan rempah-rempah di Sulawesi Tenggara. Adapun ketiga jalur itu, ialah: (1) Jalur Makassar (Selat Tiworo-Wowonii-Bungku) Banggai-Tarnate, dengan kemungkinan sehingga di Selayar, Sinjai, Kabaena, Poleang/Rumbia, Tinanggea, Moramo, Kendari. (2) Jalur Makassar-Baubau-Lohia (Muna)-Wowonii seterusnya Bungku, Banggai, dan Ternate. (3) Jalur Makassar-Baubau, Wakatobi (P.P. Tukang Besi-Buru-Ambon-Banda) (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018).

2. Faktor Ekonomi

Hubungan kerjasama antara Kerajaan Moronene dan Kesultanan Buton sudah berlangsung sejak lama, yaitu semenjak masa kerajaan Moronene menjadi penyuplai beras di Kesultanan Buton. Pertukaran ilmu, budaya, ekonomi, dan politik, bisa dilihat bahwa kedua kerajaan telah memiliki fondasi dasar yang kuat serta banyaknya persamaan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Di samping itu juga kedua kerajaan memiliki kesamaan dalam kemajemukan suku bangsa sebagai

kekuatan nilai sosial dan budaya didasarkan pengalaman sejarah dan secara bersama telah membangun kerjasama (Muh. Fian, wawancara 4 Januari 2019).

Pada masa kejayaan Kerajaan Moronene merupakan penghasil beras terbesar dan tanah yang subur untuk menanam padi. Istilah atau nama *kotuo* berubah namanya dengan dialek bahasa Buton dengan sebutan pertama; *Mokobaena* yang berarti pulau yang banyak menghasilkan padi (beras) kemudian populerlah nama pulau ini Kabaena (Jabaluddin, wawancara 19 Januari 2019).

Dikatakan pula bahwa potensi kekayaan alam yang dimiliki Kerajaan Moronene seperti hasil hutan yaitu, kayu, rotan, dan hasil-hasil hutan lainnya yang merupakan aset kerajaan yang bernilai tinggi. Berbagai jenis kekayaan hasil hutan tersebut adalah merupakan bahan baku bangunan seperti, rumah, istana dan pasar yang secara ekonomis mempunyai nilai jual yang tinggi pada masa itu. Dengan demikian inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan kerjasama antara Kerajaan/Kesultanan Buton dengan Kerajaan Moronene yang letak dan geografisnya yang strategis pada masa itu (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018).

3. *Faktor Keamanan*

Stabilitas keamanan merupakan salah faktor yang turut menentukan perkembangan Kerajaan Moronene pada masa itu. Dalam menjaga keamanan agar tetap kondusif dalam arti bebas dari gangguan bajak laut, pemerasan dalam pihak luar yang mengancam integritas atau keutuhan wilayah Kerajaan Moronene, maka Kerajaan Moronene menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara salah satunya dengan Kerajaan Buton/Kesultanan Buton sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan besar di Sulawesi Tenggara yang secara langsung merupakan bagian wilayah Kesultanan Buton (Muh. Fian, wawancara 4 Januari 2019).

Sebagaimana hubungan politik Kerajaan Moronene dengan Kesultanan Buton pada saat itu terjadi, karena Kerajaan Moronene membantu Kesultanan Buton untuk mengusir La Bolontio yang meresahkan masyarakat Buton. Kesultanan Buton sebagai pemimpin pertahanan keamanan bila ada serangan dari luar secara bersama-sama menyiapkan pasukan angkatan perang. Dalam mempertahankan eksistensi wilayah kekuasaan, Kesultanan Buton dalam menghadapi ancaman dari luar melakukan hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang secara langsung berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Buton untuk menjaga kestabilan daerah (H. Muh. Masnul, wawancara 29 Desember 2018). Dalam hal ini, Kerajaan Moronene telah menyiapkan pasukan-pasukan untuk menghadapi serangan dari luar yaitu ancaman yang datang dari pasukan La Bolontio yang meresahkan masyarakat Kesultanan Buton.

Kerajaan Moronene dalam menjaga eksistensi wilayah agar tetap terjaga dari gangguan bajak laut maupun perampas dari luar sebagai satuan kerajaan dalam bagian wilayah Kesultanan Buton, juga melakukan hubungan kerjasama antara kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya seperti Kerajaan Muna, Tiworo, dan Konawe dalam bidang ekonomi maupun politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Ruslan. 1957. *Sejarah Pertempuran di Surabaya*. Jakarta: Endang
- Budiono, Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional Kerangka Study analitik*. Bandung: Bina Cipta
- Bukharin. 1969. *Agregasi-Agregasi Masyarakat Wujud dalam Bentuk Individu yang Saling Berinte-Raksi antara satu sama lain*. Jakarta: Prenada Media Group
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasanu, Ode La. 2002. *Murtabat Tujuh dan Theo-Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1599-1633 M)*. Skripsi. Kendari: FKIP Unhalu
- Hegel, G. W. F. 2007. *Nalar Dalam Sejarah*, Jakarta: Teraju Mizan
- Herusatoto, Budiono. 2005. *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta. LkiS
- Hugiono. 1987. *Pengantar ilmu sejarah.*: Bina Aksara
- Kartodirdjo. 2002. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia
- Koenjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

-
- La Ode Zaenu. 1885. *Buton Dalam Sejarah Kebudayaan*. Surabaya: Suradipa
- Poelinggomang, L., Edward. 2002. *Makassar Abad XIX*. Jakarta: KPG
- Rambe. 2002. *Kebudayaan Moronene; Berbagai Ritual Sekitar Mata Pencarian Hidupnya; Tinjauan Geografi, Historis, dan Antropologi*. Kendari
- Sjamsuddin, Helius. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Susanto Zuhdi, dkk. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara (Kesultanan Buton)*. Jakarta: Depdikbud
- Sutton, Mark Q. & Anderson, E.N. 2010 *Introduction to Cultural Ecology*. Plymouth: Alta Mira Press
- Syahrun. 2002. *Birokrasi Kesultanan Buton 1610-1851*. Skripsi. Kendari: FKIP Unhalu
- Syainuddin. 1997. *Sejarah, Budaya dan Falsafah Hidup Masyarakatnya. Ujung Pandang*
- Tamburaka, Rustan, E, ddk. 2004. *Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*. Universitas Haluoleo Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara
- Tanassy, Fathimah. 2001. *Hadiah Tanah (Katampai) Pada Masa Kesultanan Buton Tahun 1631-1763*. Skripsi. Kendari: FKIP Unhalu
- Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: KPG
- Truman Simanjuntak dkk. 2006. *Archaeology: Indonesian Perspective R.P. Soejono's Festschrift*. Jakarta: LIPI Press
- Zuhdi, dkk. 2006. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara*. Kendari: Press